

Integrasi Nilai ecoteologis dalam kebijakan Pembangunan Nasional

Anggiat Rizq Pratama

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, negara kita yaitu Indonesia menghadapi tantangan atau masalah lingkungan yang semakin serius. Penggundulan hutan, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat. Bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran hutan sering melanda berbagai daerah, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial. Banyak wilayah telah menetapkan status siaga atau darurat, yang menunjukkan bahwa ancaman lingkungan makin mengkhawatirkan.

Tentu saja persoalan-persoalan dalam membangun Indonesia ke depan akan semakin besar di berbagai aspek salah satunya adalah tentang bagaimana kita sebagai warga negara mampu menjaga lingkungan kita. Krisis lingkungan yang melanda Indonesia semakin menegaskan bahwa bencana lingkungan bukanlah fenomena alamiah yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari praktik manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Banjir, longsor, dan kerusakan daerah aliran sungai di berbagai wilayah Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat menjadi bukti nyata bahwa lemahnya pengawasan. Kerusakan lingkungan jelas tidak pernah muncul begitu saja. Ia selalu bersumber dari cara manusia memperlakukan alam seperti apa.

Pembangunan nasional selama ini sering dipahami sebagai proses percepatan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam secara kuat. Pandangan tersebut menempatkan alam sebagai alat produksi semata, bukan sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai moral dan spiritual. Akibatnya, Indonesia menghadapi krisis ekologis yang semakin kompleks, mulai dari perusakan hutan secara luas, pencemaran lingkungan, krisis air bersih, hingga bencana ekologis yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dijalankan belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan secara ekologis.

Dalam pandangan Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dengan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab, bukan untuk merusaknya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41 merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang jauh dari nilai tuhan. Oleh karena itu, persoalan lingkungan adalah persoalan moral dan spiritual yang lahir dari cara pandang pembangunan.

Ekoteologis adalah cara pandang yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan (teologi) dengan kesadaran ekologis dalam memahami dan merespons hubungan manusia dengan alam. Dalam perspektif ini, alam tidak dipandang semata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai moral, dan spiritual.

Maka, Ekoteologis hadir sebagai kerangka berpikir yang mengintegrasikan nilai teologis dengan kesadaran ekologis. Merawat lingkungan bukan sekadar tindakan moral, tetapi merupakan bagian dari ibadah sosial yang mencerminkan tauhid dalam praksis kehidupan. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.

Integrasi nilai ekoteologis dalam kebijakan pembangunan nasional menjadi kebutuhan mendesak di zaman sekarang. Kebijakan publik tidak cukup disusun berdasarkan pertimbangan demokratis dan ekonomi semata, tetapi harus dilandasi kesadaran teologis yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama. Maka pembangunan harus bergeser dari orientasi eksploitatif menuju pembangunan yang berkeadilan ekologis, yaitu pembangunan yang menghormati daya dukung alam dan menjamin keadilan bagi generasi masa depan. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui penerapan etika lingkungan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan ekologis.

Dalam konteks kebangsaan, integrasi ekoteologis sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembangunan yang berlandaskan nilai ekoteologis tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga melindungi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan kaum miskin yang sering menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak lagi dipahami sebagai proyek bagi kelompok masyarakat tertentu, melainkan sebagai ikhtiar kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan secara sosial dan ekologis.

Bagi ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM), integrasi nilai ekoteologis merupakan laboratorium ideologis. IMM sebagai gerakan kaderisasi dan intelektual memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kritik terhadap arah pembangunan nasional yang lalai terhadap krisis ekologis. IMM harus mampu membaca persoalan lingkungan sebagai bagian dari masalah keumatan dan kebangsaan, serta merumuskan solusi pembangunan yang berlandaskan

nilai tauhid dan keadilan. Kesadaran ekoteologis harus menjadi ruh dalam gerakan advokasi, pendidikan, dan pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh IMM.

Oleh karena itu Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya dan terkendali cara-cara pengelolaan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat

Daftar Referensi

- a. Abdullah, M. Amin. 2017. *Islam Berkemajuan: Pergulatan Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- b. Arifin, Syamsul. 2019. “Ekoteologi Islam dan Tantangan Krisis Lingkungan Global.” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 6(2): 145–162.
- c. Fakih, Mansour. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- d. Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- e. Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- f. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2019. *Fikih Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- g. Santoso, Purwo. 2018. “Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Ekologis di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1): 1–15.
- h. Susanto, Happy. 2016. *Teologi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Kencana.